

/ NEWSLETTER SPECIAL EDITION /

2 TAHUN

BENCANA

SULAWESI

TENGAH



#PALUKUAT

#SULTENGBANGKIT

#2TAHUNBENCANASULTENG

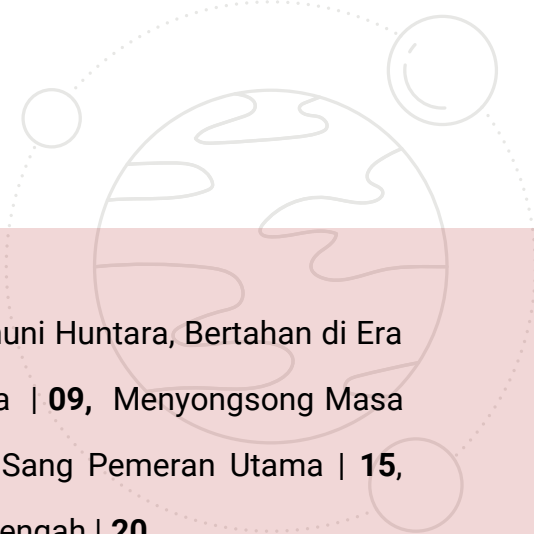
Salam Infrastruktur!

Dua tahun telah berlalu, bukanlah waktu yang singkat dan mudah dilalui bagi para penyintas bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah. Sebagian dari mereka telah pulih dari trauma, sebagian tidak dapat melupakannya, sebagian masih bertahan hidup di tenda dan huntara, sebagian masih hidup mengontrak dan berharap mendapatkan bantuan hunian tetap dan sebagian mereka mulai bangkit dan menata hidupnya, dan sebagian lainnya telah pulih sepenuhnya dari duka yang pernah mereka rasakan.

Pusat Studi Infrastruktur Indonesia, melalui newsletter khusus ini berusaha menggambarkan keadaan para penyintas dan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah. Kami berharap melalui newsletter ini, setiap pembaca dapat mengetahui kondisi saudara-saudari kita di Sulawesi Tengah. Setiap cerita mereka bisa menjadi pelajaran yang berharga dalam menghadapi dan menata kehidupan pascabencana.

Kami mendoakan saudara-saudari para penyintas untuk tetap semangat berjuang menyongsong masa depan yang lebih baik di tengah pandemi ini!

Selamat membaca!



Menolak lupa! | **01**, Penderitaan Ganda Penghuni Huntara, Bertahan di Era Pandemi | **06**, Kehidupan Baru Pascabencana | **09**, Menyongsong Masa Depan, Secuplik Pengalaman Pasigala | **12**, Sang Pemeran Utama | **15**, Refleksi Dua Tahun, Pascabencana Sulawesi Tengah | **20**.

Pembangunan Rumah Insitu

Rp. Total Dana :
1,891 T



Terverifikasi & Validasi :
91.268 KK



Target Rumah :
85.763 Unit



Pembangunan :
66.615 Unit



Selesai :
5.055 Unit

Sumber : BNPB (September 2020), KEMENPUPR (Juni 2020)

Susunan Redaksi

Dewan Pembina: Bagus Mudiantoro | **Ketua Pelaksana:** Sondang M. Napitupulu | **Sekretaris Pelaksana:** Malindo A. Marpaung | **Kontributor:** Isti Anisya, Lilik Andriyani, Niken P, Silvia S. Adelina | **Pengolah Data:** Asep Yuwono | **Penata Layout:** Lintang Aulia Putri

MENOLAK LUPA!

"The hurt may be gone, but the memories still remain!"



Bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi Sulawesi Tengah telah dua tahun berlalu. Namun, peristiwa yang terjadi pada 28 September 2018 silam masih melekat dalam ingatan para penyintas. Hal inilah yang tersirat ketika Tim Pusat Studi Infrastruktur Indonesia melakukan wawancara dengan para penyintas. Masih sangat jelas peristiwa tersebut melekat di pikiran para penyintas.

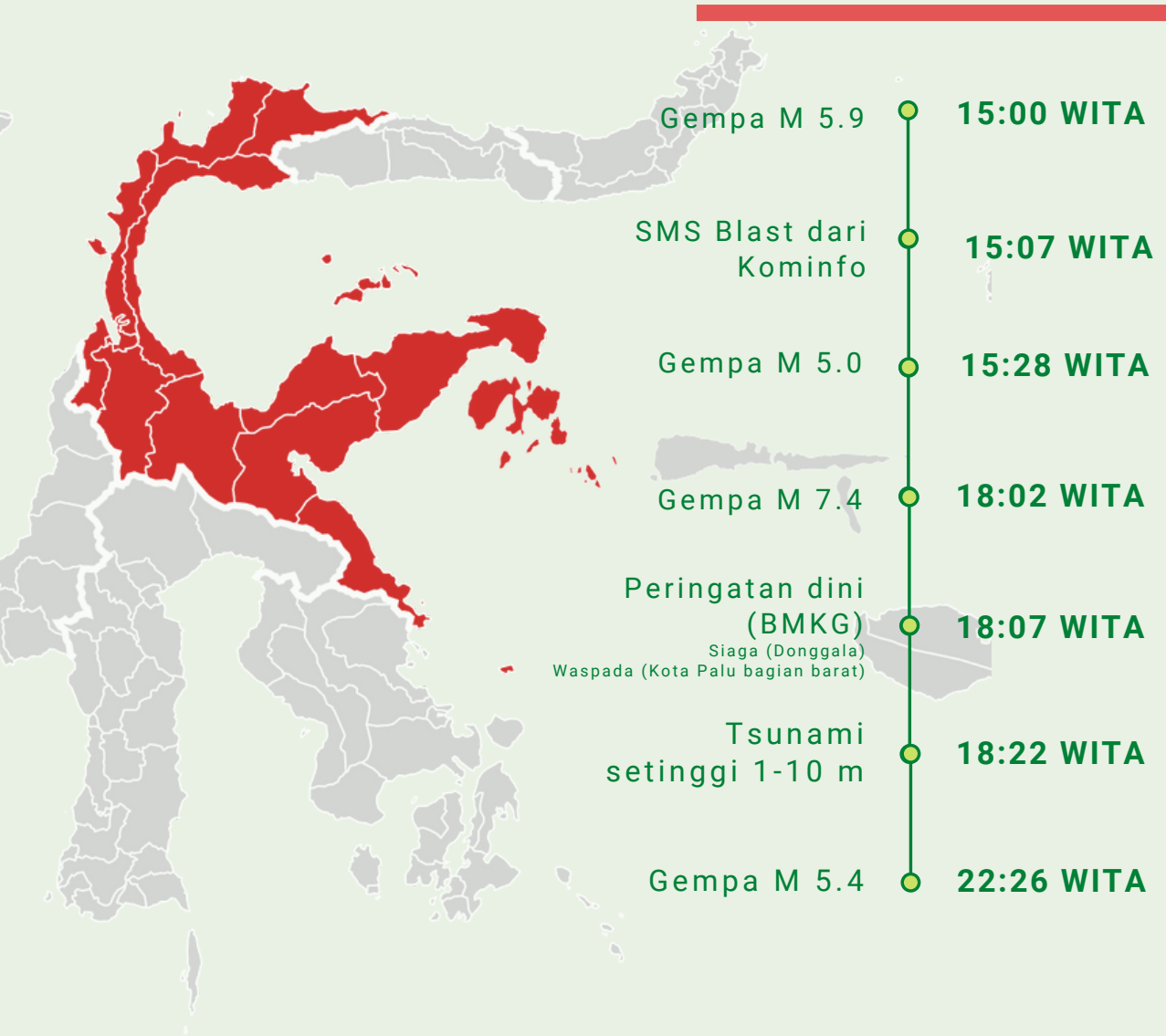
Pulih, namun Tak Terlupakan

Sri Utami (24), dengan lancar dapat menceritakan secara detail pengalaman pribadinya ketika bencana terjadi. Pada saat itu, ia bersama teman-teman kampusnya sedang melakukan rapat organisasi pada salah satu ruangan kampus. Kejadian pertama dirasakan sekitar pukul tiga sore waktu. Tak lama kemudian, Sri mendapat informasi bahwa Kabupaten Donggala telah rusak akibat gempa.

KRONOLOGI

©Malindo A.M

GEMPA, TSUNAMI DAN LIKUEFAKSI SULAWESI TENGAH



Meninggal
2.256



Luka-luka
14.254



Hilang
16.335



Mengungsi
235.911



Desa Terdampak

Sulawesi Tengah
890

Sulawesi Barat
95

Sumber:

Kompas © 2018, Disaster Management Institute of Indonesia © 2019, UNDRR © 2019



www.infraindo.org



Pusat Studi Infrastruktur Indonesia



@PSII_Indonesia



pusatstudiinfrastruktur

Setelah guncangan mereda, Sri dan teman-temannya tetap melanjutkan rapat. Gempa memang cukup sering terjadi di Kota Palu, sehingga sedikit guncangan adalah hal yang biasa bagi Sri. Topik rapat berganti menjadi bagaimana pengumpulan bantuan bagi Kabupaten Donggala.

Sekitar pukul enam sore guncangan kembali terjadi dengan skala yang lebih besar dan belum pernah dirasakan oleh Sri. Seketika, ia dan rekan-rekannya berhamburan keluar ruangan dan berkumpul di lapangan luas. Seorang rekannya sempat tertimpa rak buku yang jatuh akibat gempa, namun tidak mengalami luka serius. Ruangan yang mereka gunakan pun masih mampu menahan guncangan. Setelah gempa berhenti, Sri bersama seluruh warga kampus bertahan di lapangan kampus sekitar tiga jam lamanya sebelum akhirnya dievakuasi ke dataran yang lebih tinggi dan aman.

Pengalaman yang sedikit berbeda dialami Gref Koho (28). Saat gempa terjadi, ia sedang melaksanakan ibadah di salah satu gereja yang berada di salah satu jalan utama di Kota Palu.

Ketika gempa berlangsung Gref dan jemaat gereja segera keluar ke jalan utama menyelamatkan diri. Dalam kesaksiannya, Gref mengatakan bahwa sesaat setelah gempa masyarakat telah ramai berkumpul di jalan mengamankan diri hingga pukul 21.00 WITA hingga evakuasi ke tempat yang lebih aman dilakukan.

Kejadian gempa, likuefaksi dan tsunami, menimbulkan trauma bagi para penyintas, seperti Sri dan Gref. Sri mengaku setiap mendengar ledakan atau bunyi yang cukup lantang dirinya masih terkejut dan ketakutan, bahkan saat tidur ia selalu siap siaga dengan tas yang berisi dokumen berharga, pakaian dan makan jika sewaktu-waktu bencana datang kembali. Demikian juga dengan Gref yang membutuhkan waktu untuk menenangkan diri dari kejadian bencana dengan pulang ke kota asalnya. Meskipun tidak mengalami luka atau kehilangan rumah, keduanya mengaku trauma atas bencana tersebut. Perlahan tapi pasti, keduanya mengaku telah pulih dari trauma setelah hampir dua tahun kejadian bencana berlalu, meskipun bukan berarti mudah untuk melupakan kejadian itu.

Jembatan Ponulele rusak akibat gempa Palu





Tim SAR mengevakuasi korban gempa dari puing-puing sebuah restoran yang runtuh di Palu, Sulawesi Tengah pada 30 September 2018.

Rendahnya Kesadaran dan Pengetahuan Bencana

Beberapa jam sebelum gempa besar terjadi, pada pukul tiga sore waktu setempat, gempa telah terjadi di Pantai Barat Kabupaten Donggala, 80 km dari Kota Palu. Yaumil (35), salah seorang pegiat sosial dan pendiri Sikola Pamore menceritakan bahwa saat itu, dia beserta anak didiknya sedang bersiap menuju lokasi camping alam. Mereka telah mempersiapkan segala keperluan dalam tas seperti bekal makanan dan pakaian ganti. Saat gempa pertama terjadi, Yaumil dan anak-anak Sikola Pomore segera menjauh dari pantai ke tempat yang lebih aman. Ia juga segera membantu mengevakuasi masyarakat desa di sekitar Pantai Barat.

Sejak kecil Yaumil terbiasa mendengar cerita orang tuanya tentang tsunami yang terjadi pada tahun 1964, cerita ini memberikan kesadaran bencana kepada dirinya secara pribadi. Ia juga menceritakan bahwa masyarakat desanya sebagian besar merupakan nelayan yang lekat dengan laut, sehingga memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait gempa dan tsunami, keadaan ini membuat mereka cukup peka melihat tanda-tanda alam. Anak-anak sekitar pantai di Desa Dampal, Kecamatan Sirenja juga telah dibekali pengetahuan kebencanaan yang berasal dari cerita orang tua dan pendidikan yang mereka terima di Sikola Pomore. Kesadaran dan pengetahuan bencana ini juga menyebabkan tidak adanya korban jiwa di Desa Dampal.

Kondisi tersebut berbeda dengan Aida (26) dari Kabupaten Sigi. Ia yang saat itu sedang bersiap diri untuk sholat Magrib, segera bergegas keluar rumah akibat guncangan yang kuat. Kepanikan terjadi di lingkungan rumahnya. Seluruh tetangga bergegas keluar rumah. Seumur hidupnya, ia belum pernah merasakan peristiwa bencana yang sangat dahsyat. Tak siaga bencana tidak ada, mental dan pengetahuan untuk menghadapi bencana pun terbatas. Aida memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua di Morowali untuk menenangkan diri.

Perbedaan respon terhadap bencana tersebut sedikit menggambarkan adanya perbedaan kesadaran masyarakat di Palu, Sigi, dan Donggala yang kini dikenal sebagai Pasigala. Masyarakat di Kota Palu cenderung bertahan di tempat masing-masing ketika gempa masih dalam skala kecil. Seperti Sri dan Gref yang mengaku kurang memahami terkait bagaimana merespon bencana, sehingga saat gempa awal terjadi mereka belum menyadari atau waspada terhadap kemungkinan gempa susulan yang kemudian terjadi.

Dua tahun pascabencana Sulawesi Tengah, Sri dan Gref mengaku masih belum mengetahui dengan jelas apa yang harus mereka lakukan ketika bencana serupa terjadi. Sosialisasi atau simulasi bencana dari pihak manapun di Kota Palu belum pernah dilakukan.

Kesadaran akan bencana dirasakan oleh Aida ketika bergabung sebagai *volunteer* bersama JMK Oxfam, sedangkan Yaumil mengaku tidak memiliki ekspektasi tinggi akan adanya program peningkatan kesadaran dan pengetahuan terkait bencana dari pemerintah setempat.

Pengalaman para korban bencana diatas, menunjukkan bahwa kesadaran terhadap bencana di Pasigala masih rendah. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran dan pengetahuan akan bencana menjadi penting, terutama di daerah rawan bencana. Hal tersebut menjadi salah satu komponen untuk meningkatkan ketangguhan sehingga dapat meminimalisir jumlah korban bencana. Kita mungkin tidak bisa mencegah bencana alam terjadi, namun kita dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Seluruh *stakeholder*, termasuk pemerintah dan kita semua perlu menyadari pentingnya hal-hal tersebut.

Sri, Gref, Yaumil, dan Aida adalah sedikit dari ratusan ribu para penyintas bencana Sulawesi Tengah. Cerita dan pengalaman mereka dapat menjadi secuplik gambaran keadaan para penyintas saat ini dan pembelajaran bagi kita bersama di masa mendatang. Mari mencoba menolak lupa untuk membangun tempat hidup yang lebih berketahanan.

PENDERITAAN GANDA PENGHUNI HUNTARA BERTAHAN DI ERA PANDEMI

Seluruh desa Abdul Azim ditelan oleh likuefaksi.



© Andri Tambunan, Oxfam

Bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu, telah menghancurkan puluhan ribu rumah dan infrastruktur publik. BNPB memperkirakan dampak kerugian ekonomi dan kerusakan bangunan mencapai Rp 18,48 triliun. Penderitaan ganda dirasakan para penyintas, mereka kehilangan rumah dan kehilangan mata pencaharian akibat terhentinya kegiatan perekonomian di lokasi terdampak bencana dalam waktu yang bersamaan.

Kesulitan ekonomi sangat dirasakan para penyintas yang hingga saat ini masih harus tinggal di hunian sementara. Hampir genap dua tahun mereka mendiami huntera yang minim fasilitas layak untuk menjalani kehidupan normal sehari-hari. Mereka yang tinggal di huntera adalah mereka yang tidak punya pilihan lain untuk tempat tinggal, keadaan ekonomi awal yang memang sudah sulit, ditambah dengan bencana yang mereka alami membuat mereka secara ekonomi tak berdaya. Pada tahun 2019, para

penyintas di huntara masih terbantu dengan mendapatkan Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp 600.000,00 selama dua bulan. Namun setelah itu, hingga saat ini mereka harus berjuang sendiri memulihkan keadaan ekonomi yang menjadi semakin sulit di tengah pandemi Covid-19.

Ana (35) salah seorang penghuni Huntara Kompas menceritakan bahwa ia bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah hotel di kawasan Tondo sebelum tsunami terjadi. Ia kehilangan pekerjaannya ketika tsunami meluluhlantakkan hotel tempatnya bekerja. Setelah bencana, ia kini terpaksa menjadi ibu rumah tangga karena sampai sekarang belum berhasil mendapatkan pekerjaan baru. Keadaan menjadi semakin sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan di tengah pandemi ini.

Hal serupa juga dirasakan oleh Tini (55). Sebelum pandemi, Tini yang tinggal di Huntara Lapangan Koni bekerja sebagai tukang cuci pakaian dari rumah ke rumah, namun permintaan jasa mencuci menurun drastis sejak adanya pandemi. "Saya ini kan buruh kasar, kalau tidak keluar rumah kita tidak bisa makan. Kami juga takut virus, tapi harus bagaimana?" ujar Tini. Covid-19 membuat Tini membatasi ruang gerak yang akhirnya berdampak kepada pekerjaan yang memerlukan perpindahan tempat dari satu rumah ke rumah lainnya. Pembatasan ini tentunya bukan hanya berasal dari Tini saja, tetapi juga para pelanggan yang biasa memakai jasa Tini. Mereka memilih untuk melakukan pekerjaan rumah sendiri, dibandingkan mengambil risiko menggunakan jasa Tini yang bertemu banyak orang dalam pekerjaannya.

"sebelum corona saja mencari pekerjaan sudah susah, apalagi sekarang ini (pandemi), semakin susah saja Mbak"
-- Ana (35), Penyintas di Huntara Kompas

Pandemi Covid-19 membuat kehidupan penyintas di huntara menjadi lebih sulit. Kondisi huntara yang berupa bilik-bilik berukuran 4 x 5 meter, berbahan dasar kalsiboard, saling berhadapan dan berhimpitan tanpa pagar pemisah serta penggunaan kamar mandi komunal membuat penerapan himbauan pemerintah untuk menjaga jarak sulit dilakukan. Ruang gerak yang memang sangat terbatas membuat mereka terpaksa tidak dapat menjaga jarak dalam beraktifitas. Dapat dibayangkan jika terdapat satu orang positif Covid-19 maka virus akan menyebar sangat cepat di dalam huntara yang hanya dibatasi sekat tak lebih dari dua sentimeter ini.

Kehidupan di huntara yang telah terbangun rasa kekeluargaannya menjadi salah satu faktor risiko penyebaran virus ini. Penyintas di huntara, baik kelompok bapak-bapak maupun ibu-ibu telah terbiasa berkumpul menghabiskan waktu bersama. Begitu juga anak-anak yang sibuk bermain bersama-sama di lapangan dan area sekitar huntara. Dalam situasi seperti ini, terdapat juga sebagian penyintas yang tetap berusaha menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Selain itu, beberapa bilik juga menyediakan alat cuci tangan di teras rumahnya.

Kondisi huntara perlu mendapatkan perhatian khusus di tengah pandemi ini. Pemerintah sesungguhnya telah melakukan pencegahan dan sosialisasi di huntara, salah satunya di Huntara Lapangan Kompas yang berada di Kelurahan Tondo. Puskesmas Talise bekerjasama dengan Bhabinkamtibmas telah melakukan sosialisasi Covid-19, serta melakukan penyemprotan disinfektan di area huntara. Namun sangat disayangkan, menurut pengakuan warga kegiatan tersebut hanya dilakukan pada awal masa pandemi, dan kemudian tidak dilakukan kembali.

Ana dan Tini hanyalah contoh kecil dari ribuan penyintas yang selamat dua tahun ini masih bertahan di huntara dan tetap berjuang mempertahankan kehidupan mereka di tengah pandemi Covid-19. Sebagai warga terdampak langsung bencana, mereka juga menjadi masyarakat yang paling rentan di tengah kondisi saat ini. Masa depan mereka perlu menjadi perhatian utama semua pemangku kepentingan, agar mereka segera mendapatkan tempat tinggal yang layak. Setidaknya dengan tinggal di rumah yang layak – huntap, mereka dapat mengurangi risiko terpapar virus Covid-19.



Para penyintas di Huntara Kompas

© Silvia. A

KEHIDUPAN BARU PASCABENCANA

© Oxfam



Pemulihan mata pencaharian rumah tangga yang terdampak bencana di Sulawesi Tengah sangat penting untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya bagi anak-anak. Pemulihan ekonomi dan mata pencaharian penduduk akan memakan waktu untuk kembali pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, penyaluran bantuan berupa logistik dan uang tunai dapat menopang keluarga terdampak untuk dapat memenuhi kebutuhan prioritas keluarga dan membantu pemulihan perekonomian keluarga.

Sesaat setelah bencana, rusaknya rantai pasok menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas. Kondisi tersebut kian rumit akibat ketiadaan toko-toko yang beroperasi karena pedagang yang juga merupakan penyintas, mengalami

guncangan dan rasa tidak aman.

Penyaluran bantuan logistik pada masa tanggap darurat menjadi sangat berarti untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan nutrisi. Bantuan logistik diberikan dalam bentuk makan kering seperti biskuit dan mie instan. Selain itu, bantuan dari berbagai pihak juga termasuk penyediaan nutrisi khusus bagi anak dan ibu hamil sebagai kelompok rentan.

Dukungan pemulihan juga disalurkan dalam bentuk uang tunai melalui program Jaminan Hidup (Jadup). Bantuan sebesar Rp 600.000,00 per jiwa diberikan kepada warga terdampak selama dua bulan penuh. Atas dukungan berbagai pihak, penyaluran Jadup dapat dilaksanakan dengan baik dan terdistribusi ke Warga Terdampak Bencana (WTB) secara merata.

Meskipun begitu, banyak penerima bantuan mengeluhkan bahwa Jadup yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan pokok mereka. Keberadaan bantuan logistik dan uang tunai dengan distribusi yang baik dan merata sangat membantu para penyintas menghadapi kondisi sulit pascabencana. Mereka bersyukur dengan adanya berbagai dukungan dari banyak pihak. Para penyintas dapat bertahan hidup melalui bantuan tersebut, sembari menunggu perekonomian keluarga yang pulih perlahan.

Dari Pantai Talise ke Bundaran STQ

Pantai Talise merupakan salah satu kawasan yang mengalami kerusakan parah akibat kejadian bencana. Kegiatan perekonomian di sekitar Pantai Talise pun terhenti untuk sementara waktu. Sebelumnya, kawasan pantai ini menjadi ladang perekonomian bagi banyak pedagang dari pagi hingga malam hari. Pascabencana, kegiatan perekonomian terhenti, para pedagang kehilangan mata pencaharian dan pendapatan akibat bencana.

Terlepas dari trauma terhadap kejadian bencana, tuntutan ekonomi mendorong para pedagang Pantai Talise kembali melakukan aktivitas perekonomian. Mereka kembali berdagang di lokasi yang sama meskipun hanya berdagang hingga sore hari. Tingginya tingkat kerawanan bencana di lokasi tersebut, mendorong Pemerintah Kota Palu untuk merelokasi pedagang ke tempat yang lebih aman. Prosesnya dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya para pedagang, dan didampingi oleh Pemerintah Kota Palu.

Relokasi pedagang dilakukan dari Kawasan Pantai Talise ke Bundaran STQ dan kawasan hutan kota yang terletak di perbatasan Kota Palu dan Kabupaten Parigi Moutong. Kawasan hutan kota yang sebelumnya merupakan area perkebunan kopi dan kini menjadi kawasan kuliner yang mewadahi para pedagang dari Pantai Talise. Lokasinya tidak pernah sepi pengunjung yang umumnya merupakan kaum milenial.

Pemulihan Mandiri Tambak Garam

Lokasi tambak garam di Pantai Talise tak luput diterjang tsunami. Tambak garam hancur bersama rumah para petani garam. Para petani yang kala itu sudah mempersiapkan hasil panen ratusan ton garam habis dalam sekejap. Keluarga petani garam pun hidup dalam keterbatasan di huntara, memikirkan nasib dan memutar otak untuk dapat menyekolahkan anak-anak.

Abdul Majid (41) sebagai motor penggerak pemulihan bersama JMK Oxfam menginisiasi program padat karya bagi petani garam pada tahun 2019. Kegiatan padat karya menjadi bagian dari proses *trauma healing* dengan meningkatkan kesibukan masyarakat sembari memulihkan perekonomian. Awalnya hanya sekitar tiga sampai empat orang petani garam yang tergabung. Mereka yang mengungsi cukup jauh dari lokasi tambak garam tampak enggan untuk kembali. Tak patah semangat, para 'tuaka' juga dilibatkan, hingga akhirnya puluhan petani garam dapat bangkit bersama-sama.

Proses perencanaan pemulihan dilakukan sepenuhnya oleh kelompok petani garam. Untuk memulai kembali kegiatan petani garam, bantuan berupa sekop untuk menggali tanah dan pasir, *arco* untuk mengangkat puing-puing, papan untuk membuat petak tambak garam, hingga jaringan perpipaan untuk mengaliri air dipersiapkan oleh pihak JMK Oxfam. Pemasangan papan-papan juga dilakukan mencegah longsoran kecil pada lokasi tambak garam.

Hingga tahun 2020, petani garam aktif telah mencapai 160 orang. Tak ketinggalan, beberapa perempuan dan pemuda juga terlibat dalam proses tambak garam, terutama mereka yang kehilangan kepala keluarga. Program padat karya kini tak hanya menyiapkan modal, namun juga meningkatkan kapasitas petani garam. Program pembinaan teknologi geomembran

dipilih untuk mencegah pencemaran yang dapat berpengaruh pada hasil tambak garam. Penyuluhan ekonomi tangguh juga ditekankan agar para petani garam lebih siap dalam menghadapi kondisi yang tidak pasti.

Menyadari akan hilangnya mata pencaharian pascabencana berdampak pada kesejahteraan keluarga, pemulihan ekonomi keluarga merupakan hal yang esensial. Pemberian bantuan tunai pada dasarnya dapat membantu meringankan beban para penyintas, namun mengembalikan kegiatan perekonomian dapat memulihkan kesejahteraan keluarga. Terlepas dari banyaknya aktor yang berperan selama proses restorasi – pemerintah, LSM, hingga akademisi, menempatkan masyarakat sebagai tokoh utama adalah hal yang paling mendasar untuk menciptakan keberlanjutan dan ketangguhan.

© Hariandi Hafid/DEC



Hijrah memasukkan garam dari ladang garamnya ke dalam karung untuk dijual di Palu. Dia menerima bantuan dari JMK Oxfam untuk memulai kembali bisnisnya menggunakan dana DEC.

MENYONGSONG MASA DEPAN

SECUPLIK PENGALAMAN PASIGALA

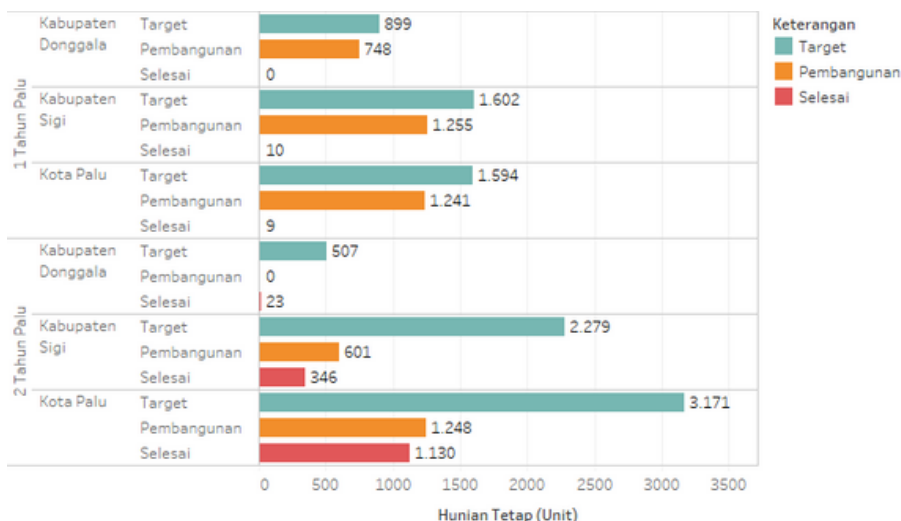
Gempa yang terjadi di Pasigala meluluhlantakkan 90.689 unit rumah dan menyebabkan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal. Kerusakan paling parah terjadi pada permukiman di sepanjang Teluk Palu. Ratusan ribu masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mengungsi ke tenda-tenda darurat dan hunian sementara (huntara) untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Sektor hunian menjadi yang paling signifikan dalam pemulihan kehidupan para penyintas.

Pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi harapan baru para penyintas. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi huntap yang ditargetkan selesai pada Desember 2020 dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah, LSM, dan masyarakat pemilik hunian melalui dana stimulan. Setelah satu tahun bencana, pembangunan huntap direncanakan untuk 4.095 unit. Jumlah tersebut meningkat menjadi 5.957 unit pada tahun

2020. Hingga satu tahun pascabencana, laporan dana stimulan tahap I hingga Oktober 2019 menunjukkan hanya terdapat 19 unit huntap di Pasigala. Jumlah huntap yang dibangun setelah dua tahun pun baru mencapai 1.499 unit.

Beberapa huntap telah diserahkan kepada warga terdampak bencana. Mereka yang kini sudah tinggal di huntap semakin siap membangun kembali kehidupannya. Kendati demikian, sebagian besar huntap masih berada pada proses pembangunan. Hal ini berdampak pada banyaknya penyintas yang masih harus menetap di huntara. Kondisi tersebut semakin rumit dengan proses pendataan dan administrasi yang kerap berulang-ulang namun warga tak kunjung mendapatkan huntap. Harapan untuk tinggal di rumah baru pada tahun 2021 mulai luntur.

Perkembangan Pembangunan Hunian Tetap (Huntap)
Sumber : Kompas (2019), Kementerian Sosial (2020)



Tanpa legalitas, huntap hanya angan-angan

Majid (41) seorang petani garam yang sebelumnya tinggal di tepi Pantai Talise kehilangan rumah serta tambak garamnya. Begitu jelas dalam ingatannya saat terombang-ambing terpisah dengan anak dan istrinya. Ia dan keluarganya berhasil bertahan dan selamat, namun rumah panggungnya kini hanya menyisakan puing-puing kayu. Sempat beranjak ke rumah kerabat di Pulau Jawa selama dua bulan, Majid memutuskan untuk kembali menyambung hidup di Tanah Talise.

Hingga dua tahun berlalu, Majid dan keluarganya masih menetap di Huntara Lapangan Koni dengan 12 bilik yang dilengkapi 4 unit toilet umum dan 4 kamar mandi. Banyak keluarga yang tinggal dalam satu unit huntara bukanlah perkara mudah. Rasa toleransi yang tinggi antar keluarga sangat dibutuhkan untuk menciptakan kenyamanan. Saat anak balita menangis, lantai yang berdecit akibat langkah kaki tengah malam, hingga adu mulut yang kerap tak terhindarkan adalah hal yang lumrah bagi para penghuni huntara.

Beberapa kali pendataan dan pengumpulan berkas administrasi dilakukan untuk mendapatkan hunian baru. Tidak ketinggalan, Majid telah berupaya mendaftarkan diri untuk mendapatkan Huntap Tondo. Namun demikian, karena permasalahan administrasi yang tidak dapat dilengkapi, mendapat rumah baru seakan hanyalah

angan-angan. Tak banyak yang dapat diperbuat. Membangun kembali rumah panggung yang lekat dengan “zona merah” mungkin menjadi pilihan terakhir bagi Majid dan keluarganya untuk dapat memiliki hunian tanpa harus menantikan bantuan huntap yang tak kunjung pasti.

Menata Masa Depan dari Huntap

Kondisi berbeda dirasakan oleh Mita (37). Rumahnya mengalami kerusakan berat dan menjadi saksi titik terakhir likuefaksi terhenti. Selama enam bulan pascabencana, Mita dan keluarganya mengungsi ke rumah kerabat hingga akhirnya memutuskan untuk menyewa indekos.

September 2019, Mita menyiapkan beberapa berkas administrasi seperti kartu keluarga, KTP, dan sertifikat tanah atas hunian sebelumnya. Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada pihak Yayasan Buddha Tzu Chi. Proses verifikasi berkas dilakukan dengan mencocokkan lokasi hunian lama dengan kelengkapan administrasi yang telah diserahkan.

Juni 2020, pembangunan Huntap Tondo I oleh Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 738 unit bersama AHA Center sebanyak 75 unit dan APEKSI sebanyak 11 unit telah selesai dirampungkan. Mita dan keluarganya menjadi salah satu dari ratusan keluarga penerima Huntap Tondo I. Rumah bertipe 36 di atas tanah seluas 150 m² dilengkapi dengan dua kamar tidur, satu ruang tamu dan satu kamar mandi telah dilengkapi dengan perabotan rumah menjadi berkah bagi Mita di tahun 2020.



Huntau Tondo I

Tidak hanya hunian, kompleks Huntau Tondo I juga dilengkapi fasilitas pendukung, seperti aula dengan halaman yang cukup luas untuk menunjang aktivitas warga. Namun demikian, Mita menuturkan lokasi huntau yang kurang ramah untuk anak, difabel dan lansia. Hal ini disebabkan karena pembangunan hunian yang dilakukan bertingkat menyerupai anak tangga akibat lokasi kondisi kelerengan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut juga kerap berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih. Jaringan distribusi air bersih yang terkadang tidak berfungsi, membuatnya harus membeli air yang dikemas dalam galon berukuran 1.200 liter seharga Rp40.000,00.

Tiga bulan berlalu, seluruh penghuni huntau langsung berbaur satu sama lain. Tak ketinggalan, para penghuni juga menginisiasi grup penghuni huntau di aplikasi WhatsApp sambil menunggu proses terbentuknya organisasi struktural, seperti RT dan RW. Tidak terdapat proses rekonsiliasi khusus yang

dilakukan oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, namun beberapa kegiatan seperti senam dan bazar diadakan secara rutin di hari Minggu. Setiap warga yang mengikuti senam diberikan voucher senilai Rp 10.000,00 untuk berbelanja pada stan-stan yang ada di area bazar. Voucher yang dibelanjakan akan diuangkan oleh pihak yayasan dan diberikan kepada pedagang yang juga merupakan penghuni Huntau Tondo I. Selain membantu penghidupan warga, kegiatan tersebut juga menjadi upaya untuk memperkenalkan satu sama lain.

Bagi Mita dan keluarganya, mendapatkan bantuan huntau menjadi awal untuk kembali menata masa depan. Tinggal di rumah yang layak bersama keluarga dan para tetangga penerima huntau seakan kembali menyalakan harapan hidup yang sempat terguncang akibat peristiwa likuifaksi. Ia berharap, proses rehabilitasi dan rekonstruksi huntau lainnya dapat segera dirampungkan agar para penyintas dapat kembali menata hidupnya.

SANG PEMERAN UTAMA

MELIHAT KEMBALI PEMANGKU KEPENTINGAN DIBALIK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SULAWESI TENGAH

© tribunnews



Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengunjungi korban terdampak bencana di rumah sakit lapangan dan pos penampungan serta beberapa titik terdampak di Kota Palu, 12 Oktober 2020.

Dua tahun bencana berlalu, belum tampak perubahan signifikan dalam kehidupan para penyintas, terutama mereka yang kehilangan rumahnya. Masih banyak warga terdampak bencana yang hidup di hunian sementara dan tenda-tenda pengungsian, seperti di Hunian Balaroa dan Petobo. Setidaknya di kedua hunian ini saja masih terdapat ratusan jiwa yang belum mendapatkan kembali tempat tinggal layak.

Terlambatnya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini menjadi perhatian berbagai pihak, terutama masyarakat terdampak bencana Sulawesi Tengah. Pusat Studi Infrastruktur Indonesia dalam tulisan ini melakukan analisis pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor permukiman. Proses pengumpulan informasi dilakukan melalui analisis dokumen, wawancara, dan informasi dari media.

Beberapa jam setelah bencana pada tahun 2018 terjadi di Pasigala, Presiden Joko Widodo meminta Menkopolkum segera menangani korban jiwa dan melakukan kegiatan tanggap darurat. Langkah penanganan dilanjutkan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melalui Instruksi Presiden (Inpres) guna mempercepat proses pemulihan di lokasi terdampak.

Berdasarkan Inpres tersebut, pemerintah yang terlibat di dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulawesi Tengah antara lain pemerintah daerah terdampak - Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala, Pemerintah Sulawesi Tengah, kementerian dan kementerian koordinator di tingkat pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI dan Polri. Pemangku kepentingan selain pemerintah yang terlibat diantaranya lembaga donor multilateral, bilateral, LSM, dan relawan. Masyarakat dalam hal ini merupakan penerima manfaat kegiatan terbagi atas warga terdampak bencana dan masyarakat umum.

Tugas, Fungsi dan Kewenangan Utama Stakeholder Berdasarkan Inpres 10 Tahun 2018

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas penunjang perekonomian, serta prasarana dasar
- Melakukan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

- Mengoordinasikan seluruh stakeholder dalam merencanakan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- Mengusulkan anggaran kepada Menteri Keuangan untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk pembangunan perumahan dengan skema swakelola
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Provinsi Sulawesi Tengah

- Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, serta memfasilitasi proses perizinan yang diperlukan
- Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kerusakan rumah masyarakat dan fasilitas pelayan serta mengusulkan rencana kebutuhan
- Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
- Memfasilitasi percepatan ketersediaan lahan untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Bupati/Walikota Terdampak

- Bertanggung jawab menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan
- Melakukan pendataan kerusakan, menetapkan data kerusakan rumah masyarakat dan fasilitas pelayanan publik serta mengusulkan rencana kebutuhan
- Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna kelancaran pelaksanaan
- Menyediakan ketersediaan lahan untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemetaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dapat menunjukkan ketertarikan dan kekuatan setiap pemangku kepentingan, sehingga kita dapat mengetahui pemangku kepentingan kunci untuk mempercepat kegiatan ini.



Sumber: Inpres 10/2018; Hasil Wawancara PSII, 2020

Berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan, pemerintah daerah terdampak merupakan pemimpin dan kunci keberhasilan dalam kegiatan ini. Pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk membangun kembali daerahnya yang terkena bencana dan memastikan warga terdampak bencana mendapatkan penghidupan dan tempat tinggal kembali. Pemerintah daerah sebagai pemegang peran administrasi wilayah

dengan kewenangan penuh atas penyediaan tanah, pendataan, dan perizinan yang dapat menunjang percepatan pemulihan oleh berbagai pihak. Sementara pemerintah daerah memimpin proses pemulihan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memfasilitasi proses perizinan, verifikasi, dan koordinasi kegiatan dari berbagai *stakeholder*.

BNPB menjadi pemangku kunci dalam mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan - pemerintah, lembaga donor, LSM, dan masyarakat yang melaksanakan respon di lokasi terdampak. Secara khusus, BNPB bertanggung jawab atas bantuan pendanaan untuk pembangunan rumah dengan skema swakelola melalui dana stimulan. Fungsi pemantauan dan evaluasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh dilaksanakan oleh BNPB, didukung oleh BPKP dan LKPP. Oleh karena itu, BNPB memiliki kewenangan dan kepentingan yang tinggi dalam kegiatan ini.

Kementerian dan Koordinator (Kemenko) melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tertuang di dalam Inpres. Kewenangan kementerian dan Kemenko tidak besar meskipun memiliki kepentingan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, respon yang dilakukan masing-masing kementerian dan Kemenko berkaitan erat dan mendukung kegiatan pemerintah daerah terdampak.

Lembaga multilateral dan bilateral bertindak sebagai donor atau pemberi bantuan yang umumnya dalam bentuk pendanaan. LSM Indonesia, LSM internasional, dan kelompok relawan memiliki kepentingan yang tinggi dalam melakukan respon kemanusiaan, namun tidak memiliki wewenang yang besar untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Oleh karena itu, seluruh responnya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Warga Terdampak Bencana (WTB) sebagai penerima manfaat memiliki kepentingan yang besar

namun tidak memiliki wewenang yang kuat dalam menentukan kebijakan dan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dari hasil pemetaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota/kabupaten merupakan kunci dari keberhasilan proses pemulihan, kemudian diikuti oleh pemerintah provinsi, BNPB dan kementerian/kemenko. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah sebagai kunci keberhasilan belum mampu menjalankan perannya dengan baik, hal inilah yang menyebabkan timbulnya carut marut di dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi hingga menghambat proses pemulihan.

Sang Pemeran Utama

Sejak awal pemerintah daerah terlihat terbata-bata dalam proses penanganan bencana. Dari beberapa wawancara dengan berbagai pihak, mereka menyampaikan ketiadaan aparat pemerintah daerah saat bencana terjadi. Hal ini ditambahkan bahwa pemerintah daerah yang juga menjadi korban belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengatasi bencana alam yang besar ini.

Keterbatasan tersebut ternyata berlanjut hingga ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah daerah yang seharusnya menjadi peran utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, masih belum mampu melakukan tugasnya dengan baik terutama terkait penyediaan data penerima bantuan yang valid dan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap sebagaimana diamanatkan dalam Inpres.

Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR menginisiasi program studi banding ke Yogyakarta. Proses pemulihan pasca gempa bumi di Kabupaten Bantul pada tahun 2006 yang dikenal dengan REKOMPAK menjadi prestasi dalam penanganan bencana. Namun demikian, kunjungan dalam waktu singkat tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pemerintah daerah.

Berkaca dari kinerja pemerintah daerah dalam penanganan bencana di Sulawesi Tengah, pemerintah pusat seyogianya memberikan pendampingan khusus dan peningkatan kapasitas kepada pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Penulis mendorong pemerintah pusat melalui BNPB melakukan pendampingan khusus dan komprehensif kepada pemerintah daerah melalui

bantuan teknis, berbagai pelatihan dan beprogram *capacity building* terprogram. Peningkatan kapasitas juga perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia secara umum dalam mengelola berbagai bantuan internasional.

Dinamika yang terjadi selama proses pemulihan pascabencana di Sulawesi Tengah menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk meningkatkan kapasitas masing-masing. Tidak ada kata terlambat bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuannya, mengingat tingkat kerawanan dan kerentanan Indonesia yang tinggi terhadap bencana. Pemerintah daerah dalam hal ini didorong untuk membuka diri yang seluas-luasnya terhadap pembelajaran dan praktik terbaik dari pengalaman daerah lain bahkan negara lainnya sehingga mampu menghadirkan proses pemulihan yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih inklusif.





REFLEKSI DUA TAHUN PASCABENCANA SULAWESI TENGAH

Pulih dari kejadian paling mematikan bukanlah perkara mudah. Dua tahun sudah, berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan roda kehidupan Pasigala. Tak tanggung-tanggung, berbagai upaya dilakukan masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga komunitas, termasuk dukungan lembaga internasional seperti PBB, lembaga multilateral, dan bilateral dari sekitar 50 negara. Pemerintah Indonesia menyambut baik berbagai bantuan kemanusiaan internasional, meskipun sempat membatasi kedatangan pekerja kemanusiaan internasional di lokasi terdampak untuk menyusun garis koordinasi antar pihak.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Pasigala adalah hal mendasar.

Berbagai tokoh masyarakat di tingkat desa menjadi informan kunci dalam pengumpulan data dan *rapid assessment*. Para kader dilibatkan dalam proses penyusunan rencana aksi desa sebagai dokumen yang akan mengintegrasikan setiap respon pemulihan.

Kolaborasi dengan akademisi dan kader-kader di lingkungan masyarakat dilakukan untuk memastikan transfer pengetahuan telah diakomodasi selama proses pemulihan. Tak ketinggalan, penguatan kapasitas juga dilakukan kepada perempuan – terutama mereka yang kini menjadi kepala keluarga – mengenai legalitas hunian, proses rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pembangunan rumah yang tahan terhadap bencana.

Tantangan Pemulihan Pascabencana

Proses koordinasi dalam masa kritis menjadi tantangan sejak awal respon tanggap bencana. Banyaknya bantuan yang masuk dari berbagai sumber, termasuk dari masyarakat dan lembaga internasional, membutuhkan koordinasi yang kuat untuk menghindari tumpang tindih dalam penyaluran bantuan serta pendistribusian bantuan kepada para penyintas secara merata. Di sisi lain, pemerintah daerah dengan kewenangan penuh atas lokasi bencana yang diharapkan menjadi *focal point* dalam penanganan pascabencana menjadi korban dari serangkaian bencana yang terjadi di Pasigala. Upaya perbaikan alur koordinasi, kemudian dilakukan melalui dibentuknya klaster-klaster penanganan yang dikepalai oleh beberapa kementerian yang didukung oleh wakil kepala dari NGO dan lembaga humanitarian internasional.

Di masa tanggap darurat, berbagai pihak secara spontan mengupayakan diri dalam pengumpulan serta penyampaian informasi. Sesaat setelah kejadian bencana, data awal, serta dokumentasi secara cepat dilakukan dengan mengandalkan media sosial seperti WhatsApp Group namun hal ini menghadapi tantangan dalam verifikasi

dan validasi data. Tantangan penyediaan data berlanjut hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Keterbatasan data terpilah berdasarkan usia, gender, status kerentanan dan disabilitas turut menjadi tantangan dalam penentuan program perlindungan yang inklusif. Keterbatasan tersebut dapat mengurangi efektivitas dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Di sisi lain, pemulihan secara tepat dan cepat sangat dibutuhkan untuk menghindari masyarakat, terutama kelompok rentan dari jebakan kemiskinan pascabencana. Konsolidasi data, transparansi serta informasi yang dapat diakses secara luas dan akurat perlu disiapkan secara bersama dalam mendukung masa tanggap darurat dan rekonstruksi.

Proses perencanaan pembangunan dan relokasi dihadapkan pada ketidakpastian tata ruang. Ketidakpastian zona rawan bahaya terkait erat dengan investasi sumber daya di lokasi yang nantinya dapat dianggap berada di tempat yang 'salah'. Setelah hampir dua tahun, Perda RTRW memasuki babak akhir. Sementara proses administrasi akhir berjalan, bantuan dana stimulan diberikan oleh berbagai lembaga, seperti Arkom untuk pembelian lahan oleh masyarakat terdampak, sehingga dapat membangun RISHA yang jauh dari sempadan pantai. Respon ini menjadi inovasi khusus dalam sub-klaster hunian.

Kolaborasi dilakukan oleh Save the Children dengan Universitas Tadulako untuk pemulihan di sektor pendidikan melalui *retrofitting* bangunan sekolah dengan memperkuat struktur bangunan gedung.

Pelibatan masyarakat dalam program WASH oleh Oxfam untuk menjaga praktik PHBS dan keberlanjutan infrastruktur air bersih dan sanitasi yang telah pulih.

Penyediaan lahan sebagai tantangan yang lazim dalam setiap proses pembangunan, tak terkecuali lahan bagi penyediaan hunian di Pasigala. Keterbatasan lahan di luar zona rawan bahaya, sejarah kepemilikan tanah, hingga proses panjang dalam menentukan harga tanah yang sesuai dengan para pemilik tanah harus dihadapi pemerintah daerah. Ketika lokasi lahan telah ditetapkan, tantangan berikutnya muncul dari rekayasa teknis yang diperlukan untuk menghadapi kondisi geografis.

Klaster infrastruktur pada penanganan pascabencana menghadapi kendala dalam proses sinkronisasi aturan dan persyaratan teknis. Pendekatan respon tanggap darurat ditekankan pada pembangunan secara cepat dengan kuantitas yang memadai dan tetap aman bagi lingkungan, sementara kualitasnya kemudian ditingkatkan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Misalnya pembangunan jamban untuk menghindari perilaku hidup tidak sehat yang dapat memicu penyakit diare. Proses konsultasi teknis kerap berbenturan dengan standar teknis yang juga mengedepankan kualitas sehingga memungkinkan output yang lebih baik, namun membutuhkan waktu yang lama dalam konteks kedaruratan.

Di tengah proses yang berjalan, rehabilitasi dan rekonstruksi menghadapi pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan proses pembangunan dan penghunian huntap. Pemerintah Indonesia menyatakan wabah global

Covid-19 sebagai darurat nasional. Penanganan wabah dilanjutkan dengan membatasi pergerakan dan aktivitas di luar ruangan untuk menghindari penyebaran virus. Hal ini telah mempengaruhi berbagai kegiatan di lapangan, seperti pengaturan shift kerja untuk membatasi jumlah pekerja dalam satu waktu hingga penundaan beberapa kegiatan pemulihan yang bersifat mengumpulkan massa.

Ketidakpuasan kelompok masyarakat akan kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana juga memicu gejala sosial. Keberpihakan terhadap kelompok rentan yang kerap terlupa, lamanya waktu tunggu terhadap proses pemulihan, hingga hidup serba terbatas di huntara akibat kehilangan banyak aset membuat masyarakat jenuh. Aksi-aksi demonstrasi pun menjadi tak terhindarkan.

Take Away Package

Berhadapan dengan bencana alam yang mematikan bukanlah pengalaman pertama bagi Indonesia. Gempa diikuti tsunami yang melanda Aceh, gempa yang mengguncang Nias dan Bantul, hingga letusan gunungapi Merapi dan Kelud nampaknya belum cukup membangun ketangguhan kita dalam merespon bencana. Sesar Palu-Koro yang disebut-sebut sebagai pemicu bencana di Sulawesi Tengah sejak tahun 1907 bahkan telah terdokumentasikan dengan

“Proses pemulihan membutuhkan pendekatan dan respon yang berbeda dengan kondisi normal”

– IFRC, 2020.

baik juga tidak sepenuhnya mampu membangun kesiapsiagaan daerah. Banyaknya korban jiwa dan kerusakan bangunan, hingga secuplik kisah para penyintas saat berhadapan dengan bencana menggambarkan betapa kita tak kunjung siap menghadapi bencana.

Perjalanan panjang pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah memberikan catatan refleksi bagi seluruh pihak. Terlepas dari kesulitan dalam situasi pascabencana, proses pemulihan memberikan peluang untuk membangun kembali dengan lebih tangguh. Menempatkan warga terdampak bencana sebagai pusat dari berbagai respon kemanusiaan mendorong tercapainya pemulihan yang inklusif.

Kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan hal yang utama. Kebersamaan dan kolektivitas sebagai modal sosial bagi setiap masyarakat terdampak dapat mempercepat pemulihan penghidupan dan ekonomi. *Life recovery* yang lebih awal selanjutnya mendukung upaya berbasis keluarga dalam meningkatkan taraf hidup pascabencana sembari menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai.

Respon yang efektif terhadap bencana sangat bergantung pada informasi dan sumberdaya. Relasi yang terbentuk antar kelompok masyarakat dengan pihak relawan dan NGO semestinya dimaknai sebagai jembatan antara masyarakat terdampak dengan para pengambil keputusan. Kolaborasi antara masyarakat terdampak, pemerintah, NGO dan relawan, serta pihak swasta dapat membuka ruang diskusi serta meningkatkan sistem komunikasi sehingga didapat informasi secara komprehensif.

Pendampingan dan kolaborasi yang kuat pada proses pemulihan dapat menjadi titik awal penguatan kembali kapasitas pemerintah daerah. Berbagai bantuan yang masuk seyogianya tidak hanya dipahami sebagai bantuan dana kemanusiaan untuk pemulihan sesaat, namun lebih dari itu, segala bentuk transfer pengetahuan hendaknya dimaknai sebagai kekayaan dan modal pengetahuan bagi pemerintah setempat untuk pengembangan ke depan, menghindari respon yang salah dalam situasi kritis, dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kejadian tidak terduga di masa mendatang. Bersama kita bisa!




© arif nur rokhman/unsplash







**PUSAT STUDI
INFRASTRUKTUR
INDONESIA**

Jl. Pegangsaan Barat 6-12, Tower 3 Lt. 7 No. 1
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320
(021) 21572255
psi@infraindo.org | www.infraindo.org

 @PSII_Indonesia

 pusatstudiinfrastruktur

 Pusat Studi Infrastruktur Indonesia